

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-12, 2012.

Carlton Clymer Rodee dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT RadjaGrafindo, 2013.

Cetak Biru, *Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004.

Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD NRI 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Feri Amsari, *Perubahan UUD NRI 1945; Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2011.

Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

International IDEA, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, Stockhol, 2002.

Janedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Kontrak Sosial)*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksannya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

_____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.

_____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.

- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mafud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2010.
- _____, *Naskah Konferhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku IV: Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- _____, *Naskah Konferhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V: Pemilu*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Garafika, 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2014.
- Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Naskah Usulan Amandemen Kelima UUD NRI 1945 (Naskah Konferhensif) dari Dewan Perwakilan Daerah.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1993.
- Refly Harun, *Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sarundajang, *Pilkada Langsung, Problem dan Prospek*, Katahasta Pustaka, 2005.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 26 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daaerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: FH UI Press, 2008.
- Suharizal, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang Proses, dan hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI: Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Jakarta: Themis Books, 2013.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.

B. Jurnal

- A.Mukthie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas; Penyelesaian Hukum Penyelesaian Pemiludan PHPU*, Jurnal Konstitusi Vol 6 Nomor 1, April 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.
- Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum*, dalam Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1, Juni, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.
- Sri Hastuti Puspita Sari, *Mahkamah Konstitusi Dan Penegakan Demokrasi Konstitusional* dalam Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 3, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten Kota.

Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pilkada bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan perhitungan suara, telah dilakukan berbagai tahapan, misalnya tahap pendaftaran, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan lain sebagainya.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi 72-73/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUUXII/2014.

Putusan Nomor 482 K/ TUN/ 2003.

E. Media Cetak

Khaiful Fahmi, *Menyelamatkan Keadilan Pilkada*, Harian Kompas edisi 24 Maret 2017.

Saldi Isra, *Quo Vadis Komisi-Komisi Negara*, Harian Media Indonesia, 28 September 2005.

Veri Junaidi, *Pengadilan Pemilu demi Kepastian Hukum*, koran Kompas edisi Rabu, 22 Maret 2017.

F. Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD>

<https://slamethariyanto.wordpress.com/2008/01/29/sengketa-pemilihan-gubernur-sulawesi-iselatan-2007>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11768#.WTUyHjFjhHO>

<https://www.kanalhukum.id/kanalis/dinamika-politik-legislasi-pembentukan-undang-undang-tentang-pemilihan-gubernur-bupati-dan-walikota/36>

<http://news.metrotvnews.com/opini/dN6Ojq0b-salah-arrah-revisi-uu-pilkada>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5>

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/21/063877220/yusril-ihza-pengadilan-khusus-sengketa-pilkada-perlu-dibentuk>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Tata_Usaha_Negara

